PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAPUAS HULU MENURUT PENGGUNAAN

Gross Regional Domestic Product of Kapuas Hulu Regency
by Expenditure

2012-2016





PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KAPUAS HULU MENURUT PENGGUNAAN

Gross Regional Domestic Product of Kapuas HuluRegency by Expenditure

2012 - 2016



Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Penggunaan 2012-2016

Gross Regional Domestic Product of Kapuas Hulu Regency by Expenditure 2012-2016

 Katalog BPS
 : 9302008.6109

 Ukuran Buku
 : 21,59 cm x 27,94 cm

 Jumlah Halaman
 : xii + 83 Halaman

Penyunting/Editor:

Kepala BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Naskah:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Gambar Kulit:

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Kapuas Hulu

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

Kata Pengantar

Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran 2012-2016 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun-tahun sebelumnya yang diterbitkan BPS Kabupaten Kapuas Hulu. Berbeda dengan serial publikasi tahun sebelumnya, publikasi seri 2012-2016 menggunakan tahun dasar 2010.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/ permintaan akhir sesuai dengan konsep *System of National Accounts* 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah).

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/ perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Kami menyadari, bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Kapuas Hulu, 13 September 2017
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

GUNTUR PRAHARA, SST., M.Si

Daftar Isi

Kata P	Pengantar	ii
Daftar	· Isi	iv
Daftar	· Tabel	v
Daftar	· Lampiran	vivi
I. Per	ndahuluan	1
1.1 1.2	Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	
II. Me	otode Estimasi & Sumber Data	5
2.1 2.2		9
2.3 2.4 2.5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	13
2.6		
III. Tin	njauan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu	23
3.1 3.2	Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Kapuas HuluMenurut Pengeluaran Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	
3.3 3.4	9	
3.5 3.6		
3.7 3.8	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	31
3.9	3	
	nutupmpiran	
* <u>_</u> a:	pq	

Daftar Tabel

3.1. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kapuas Hulu Tahun 2012-201629
3.2. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012-201631
3.3. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012-201632
3.3. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012-201632

Daftar Lampiran

n 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas HuluAtas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2012-2016 (juta rupiah)36
nn 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas HuluAtas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan, 2012-2016 (juta rupiah)37
nn 1.3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)38
nn 1.4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)39
nn 1.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)40
nn 1.6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)41
nn 1.7. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Penggunaan (2010 = 100), 2012-2016 (persen)42
nn 1.18. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)43

1



Pendahuluan

I. Pendahuluan

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/ regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi,

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalian, 3. Industri Pengolahan, 4. Pengadaan Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10. Informasi dan Komunikasi, 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estat, 13. Jasa Perusahaan, 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, 17. Jasa

lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) lembaga non profit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 Kegunaan Statistik PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- 1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

- Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektorsektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
- 4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan komunikasi, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
- 5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- 6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri.
- 7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

2

Hitle: INCOME SHILLING TO SHILLING SHIL

II. Metode Estimasi & Sumber Data

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

2.1.1 Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

2.1.2 Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

2.1.3 Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Jenisjenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (Classifications of Individual Consumption by Purpose) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

- 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- 2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- Pakaian dan alat kaki.
- 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- 5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
- 6. Kesehatan
- 7. Angkutan
- 8. Komunikasi
- 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- 10. Pendidikan
- 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- 12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka dalam penyajian di publikasi ini, 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

- 1. Makanan, Minuman, dan Rokok
- 2. Pakaian dan Alas Kaki
- 3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 4. Kesehatan dan Pendidikan
- 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 6. Hotel dan Restoran
- 7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (owner occupied dwellings);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (direct purchase) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut)
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.

 Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

2.1.4 Penghitungan PKRT Tahunan

2.1.4.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2.1.4.2 Metode penghitungan

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PKRT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (adjustment). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya. Penyesuaian (adjustment) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

- 1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun

- 2. Terhadap data poin ke-1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- 3. Data poin ke-2 dikelompokan menjadi 7 kelompok COICOP,
- 4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-adjust,
- 5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;
- PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

2.2.1 Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

2.2.2 Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

2.2.3 Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

2.2.4 Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

2.2.4.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PK-LNPRT adalah :

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
 Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil up-dating direktori LNPRT.
 Informasi yang diperoleh dari hasil up-dating direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2.2.4.2 Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

 Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

 $ar{x}_{ij}$: Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

 n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i: Jenis lembaga LNPRT, i = 1, 2, 3, ..., 7

j : Jenis pengeluaran LNPRT, j = 1, 2, 3, ..., 19

Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT Atas Dasar Harga Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

2.3.1 Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

2.3.2 Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

- 1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
- 2. memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dala hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

2.3.3 Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; PK-Pemerintah Desa/ Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

2.3.4 Penghitungan PDRB Tahunan

2.3.4.1 Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)

- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2.3.4.2 Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut :

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah ADHB =

Output non pasar – Penjualan barang dan jasa + Output Bank Indonesia

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

2.4.1 Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan

investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

2.4.2 Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

2.4.3 Cakupan

PMTB terdiri dari:

- Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (cultivated asset), produk kekayaan intelektual (intellectual property products), dan sebagai-nya;
- 2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

2.4.4 Penghitungan PMTB Tahunan

2.4.4.1 Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2.4.4.2 Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masingmasing. Pendekatan "langsung" adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan "tidak langsung" adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan "arus komoditas". Dalam hal ini penyediaan atau "supply" dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari

impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di "deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-deflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di "*reflate*"(dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan

dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Ke dua,* untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men"deflate" PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-deflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 Perubahan Inventori

2.5.1 Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

2.5.2 Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

2.5.3 Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- Berbagai jenis bahan baku & penolong (material & supplies), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;

- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

2.5.4 Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

2.5.4.1 Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2.5.4.2 Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi "korporasi", sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi "komoditas".

Di lihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb:

- menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara men deflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (commodity flow). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;

• Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

2.6 Ekspor Impor

2.6.1 Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

2.6.2 Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

2.6.3 Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
 Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

2.6.4 Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

2.6.4.1 Sumber data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)

- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2.6.4.2 Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga free on board (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (direct purchase) dan transaski yang tidak terdokumentasi (undocumented trasnsaction) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



Tínjauan Ekonomí Kapuas Hulu

III. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Hulu tentunya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan. Tujuan pembangunan baik di bidang ekonomi maupun pembangunan di bidang sosial, kesemuanya ditujukan agar ada perubahan ke arah yang lebih baik. Potret pembangunan ekonomi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2012–2016 yang terekam pada pertumbuhan ekonomi menunjukkan tanda positif.

3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Kapuas Hulu memperlihatkan trend yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 tercatat 5,28 persen meingkat 0,62 poin dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang mencapai 4,66 persen.

Kinerja perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2016 cukup baik ditandai dengan pertumbuhan positif yang terjadi hampir di seluruh komponen PDRB penggunaan, hanya komponen pengeluaran konsumsi pemerintah, perubahan inventori, dan ekspor luar negeri yang mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi negatif pada ketiga komponen tersebut menandakan bahwa komoditas yang digunakan masyarakat Kapuas Hulu masih bergantung pada suplai dari luar daerah atau luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pada tahun 2016 untuk konsumsi pemerintah mengalami pemotongan anggaran sehingga pertumbuhan negatif. Pada tahun 2016, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai 6,00 persen, di tempat ke dua tertinggi ditempati oleh komponen net ekspor antar daerah yang tumbuh sekitar 4,23 persen sedangkan pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran konsumsi lembaga non profit rumah tangga, dan

Impor luar negeri masing-masing tumbuh sebesar 2,00 persen, 0,39 persen, dan 0,16 persen. Komponen import luar negeri walaupun tumbuh hanya kecil sekali tetapi ini sudah mulai menunjukan perubahan signifikan dibanding tahun sebelumnya sejak diresmikannya pos lintas batas antar negara Indonesia dan Malaysia di Nanga Badau pada tahun 2016 yang lalu.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Pada tahun 2016 tiga besar kontributor komponen PDRB penggunaan yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan pengeluaran konsumsi pemerintah, menyumbang sebesar 57,31 persen, 33,36 persen, dan 16,66 persen.

3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Peranan konsumsi rumah tangga masih sangat penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu. Secara absolut penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga terus meningkat dan penggunaannya lebih dari separuh total PDRB. Jika pada tahun 2015 sebesar 4,14 triliun rupiah, maka pada tahun 2016 nilainya meningkat menjadi 4,49 triliun rupiah.

Pada tahun 2016 kontribusi komponen konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari 57 persen. Secara umum, konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok makanan. Tahun 2016 pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan, minuman, dan rokok mencapai 2,66 triliun rupiah, sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan mencapai 1,83 triliun rupiah.

Ini berarti bahwa sekitar 59 persen pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kapuas Hulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan, sedangkan sisanya, sebesar 41 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan seperti pakaian dan alas kaki; perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya; hotel dan restoran; dan lainnya.

3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga swasta nirlaba merupakan salah satu lembaga yang pengeluaran konsumsinya mempunyai kontribusi relatif kecil terhadap nilai PDRB Kabupaten Kapuas Hulu dibanding dengan komponen lainnya. Pendapatan atau kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu faktor penentu perkembangan kegiatan lembaga ini.

Nilai PDRB komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 sebesar 27,12 miliar rupiah turun 227 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kontribusi komponen ini dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu masih relatif kecil kurang dari 1 persen, hanya berkisar 0,3 persen saja. Hal ini disebabkan karena lembaga swasta nirlaba yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu pengeluarannya relatif kecil dibanding pengeluaran untuk komponen lainnya, sehingga sumbangan terhadap PDRB tidak signifikan. Bahkan dibandingkan tahun sebelumnya kontribusi komponen LNPRT mengalami penurunan.

Komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba atas dasar harga konstan mengalami pertumbuhan relatof kecil sebesar 0,39 persen pada tahun 2015, mengalami penurunan yang cukup signifikan mencapai 4,20 poin jika dibanding pertumbuhan pada tahun 2015 yang mampu tumbuh sebesar 4,59 persen. Hal ini disebabkan karena lembaga swasta nirlaba ada yang sudah tidak aktif dan lembaga lain relatif berkurang kegiatannya dibanding tahun sebelumnya.

3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah

Dalam perekonomian suatu negara, pemerintah mempunyai peran ekonomi yang sangat penting yakni sebagai konsumen, produsen, dan juga pengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang tertentu. Mengingat peran pemerintah yang besar dalam perekonomian, maka segala aktivitas ekonomi pemerintah perlu dicatat dan dianalisis lebih lanjut, terutama untuk pengeluaran konsumsi pemerintah.

Sebagai konsumen, pemerintah melakukan kegiatan barang/jasa dan dihitung sebagai konsumsi akhir. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adalah nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal pemerintah, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit yang kegiatannya tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah.

Secara absolut konsumsi pemerintah tahun 2016 sebesar 1,27 triliun rupiah turun 113 miliar rupiah dibanding tahun 2016. Penurunan ini disebabkan karena adanya kebijakan penghematan anggaran. Walaupun mengalami penurunan, tetapi kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 16,21 persen menempatkan konsumsi pemerintah pada posisi ke tiga terbesar penyumbang struktur PDRB Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara riil, berdasarkan harga konstan 2010, pengeluaran konsumsi pemerintah tahun 2016 sebesar 929,63 miliar rupiah menunjukkan penurunan 9,25 persen dibanding tahun sebelumnya.

3.5 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor utama dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu daerah melalui peningkatan kapasitas produksi. Di dalam PDRB, investasi tercermin dalam pembentukan investasi fisik yakni Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan perubahan

inventori. PMTB erat hubungannya dengan keberadaan aset tetap (fixed asset) yang dimiliki oleh suatu unit produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi, mesin, kendaraan, ternak, tumbuhan, dan barang modal lainnya.

Komponen PMTB berkontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Sumbangan terbesar 34,56 persen. Angka ini menempatkan komponen PMTB menjadi penyumbang terbesar kedua, setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga pada struktur PDRB menurut penggunaan. Hal ini berarti sepertiga dari struktur perekonomian di Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kontribusi dari komponen PMTB. Secara absolut PMTB tahun 2016 sebesar 2,71 triliun rupiah naik 186 miliar rupiah dibanding tahun 2015. PMTB di Kabupaten Kapuas Hulu sebagian besar masih digunakan PMTB untuk bangunan, sebesar 2,12 triliun rupiah, menyumbang sebesar 78,19 persen terhadap pembentukan komponen PMTB. Sedangkan sisanya 21,41 persen digunakan untuk investasi non bangunan, sebesar 591 miliar rupiah.

Secara riil, berdasarkan harga konstan 2010, PMTB tahun 2016 sebesar 1,86 triliun rupiah, menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,00 persen. Pertumbuhan PMTB untuk bangunan berada pada level 2,39 persen dan PMTB non bangunan sebesar 0,47 persen.

3.6 Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "**persediaan**" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila

bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.1.

Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kapuas Hulu,
Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

	Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tota	al Nilai Inventori (Juta Rupiah)					
A.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	43,300.98	45,245.67	64,215.40	(268,754.44)	25,586.88
B.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	40,928.29	80,371.14	39,203.69	(190,025.26)	(42,661.92)
Proporsi Terhadap PDRB (persen ADHB)		0.83	0.78	1.01	(3.81)	0.33

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Secara total, nilai ekspor tahun 2016 menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dan pergerakannya relatif fluktuatif. Pada tahun 2013 ekspor sempat mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2013, nilai ekspor mencapai 615,11 miliar rupiah dan tahun 2012 nilai ekspor sebesar 399,22 miliar rupiah. Tahun 2014 ekspor turun menjadi 236,92 miliar rupiah, tren ini terus berlanjut untuk dua tahun berikutnya dimana pada tahun 2015 nilai ekspor luar negeri 212,55 miliar rupiah dan 203,41 miliar rupiah untuk tahun 2016.

Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung menurun dengan nilai "riil" masing-masing tahun sebesar 419,01 miliar rupiah (2012); 596,60 miliar rupiah (2013); 181,62 miliar rupiah (2014); 182,96 miliar rupiah (2015); dan 183,25 miliar rupiah (2016). Selama kurun waktu 2012 - 2016, sejalan dengan nominal nilai ekspor yang relatif fluktuatif, proporsinya dalam PDRB mengalami perkembangan yang sama, berturut-turut dari tahun 2012-2016 sebesar 7,68 persen, 10,60 persen, 3,71 persen, 3,01 persen, dan 2,59 persen.

Tabel 3.2.
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu,
Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor Luar Negeri (Juta Rupiah)					
A. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	399,217.00	615,106.37	236,917.62	212,546.04	203,409.56
B. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	419,013.54	596,599.01	181,616.87	182,960.35	183,247.74
Proporsi Terhadap PDRB (persen ADHB)	7.68	10.60	3.71	3.01	2.59

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kapuas Hulu. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kalbar terhadap ekonomi atau produk daerah dan negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kalbar di luar negeri, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 3.3.

Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Kapuas Hulu,
Tahun 2012-2016 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor Luar Negeri (Juta Rupiah)					
A. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	324,409.72	363,746.58	402,429.91	443,276.28	481,267.22
B. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	291,139.74	277,388.63	286,689.01	323,276.28	303,140.01
Proporsi Terhadap PDRB (persen ADHB)	6.24	6.25	6.31	6.28	6.14

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Tabel di atas menunjukan bahwa pola perkembangan impor Kapuas Hulu pada periode tahun 2012 s.d 2016 untuk adb cenderung meningkat, sedangkan untuk adk fluktuatif dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Lima tahun terakhir proporsi impor terhadap PDRB secara keseluruhan juga cenderung fluktuatif diangka 6 persen.

3. 9 Perkembangan Net Ekspor Antar Daerah

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adh Konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "negatif" berarti nilai impor antar daerah lebih besar dari pada ekspor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*.

Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang *(balancing item)* dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

4



Penutup

I. Penutup

- 1. PDRB menurut penggunaan tahun 2010 s.d 2014 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
- 2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
- 3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2010 s.d 2014, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
- 4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
- 5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (external account) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (current tranfer) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu terhadap ekonomi daerah lain (rest of the country).



Lampiran

Lampiran 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2012-2016 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,995,304.63	3,406,163.30	3,768,616.77	4,140,425.26	4,486,501.00
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	1,651,483.82	1,847,155.48	2,029,809.78	2,238,749.29	2,463,049.38
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	129,624.44	154,378.21	164,968.91	189,178.62	203,177.24
1.c. Pakaian	113,623.86	117,297.63	129,443.58	139,798.65	145,146.76
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	223,562.32	259,433.76	285,855.00	315,319.66	341,702.67
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	42,771.37	50,608.44	55,966.81	63,428.50	67,151.98
1.f. Kesehatan	92,078.30	104,732.07	119,212.31	124,388.84	128,147.90
1.g. Transportasi /Angkutan	343,239.23	418,673.85	477,684.07	507,272.35	554,402.63
1.h. Komunikasi	46,346.18	52,988.67	64,234.54	72,422.76	81,259.04
1.i. Rekreasi dan Budaya	73,533.95	92,623.15	104,366.12	116,616.62	112,363.56
1.j. Pendidikan	35,273.58	39,716.89	44,773.89	49,348.40	52,941.70
1.k. Restoran dan Hotel	167,908.66	190,579.17	200,213.00	218,460.45	220,910.80
1.1. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	75,858.92	77,975.98	92,088.76	105,441.14	116,247.34
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	20,438.12	23,460.23	25,649.65	27,351.72	27,124.44
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	899,668.67	1,020,743.18	1,157,028.26	1,384,352.27	1,271,499.52
3.a. Konsumsi Kolektif	899,668.67	1,020,743.18	1,157,028.26	1,384,352.27	1,271,499.52
3.b. Konsumsi Individu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,941,165.68	1,994,685.69	2,276,276.52	2,524,974.01	2,710,684.77
4.a. Bangunan	1,554,922.80	1,588,286.06	1,788,859.33	1,964,184.18	2,119,382.88
4.b. Non-Bangunan	386,242.87	406,399.63	487,417.19	560,789.83	591,301.89
5. Perubahan Inventori	43,300.98	45,245.67	64,215.40	(268,754.44)	25,586.88
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	399,217.00	615,106.37	236,917.62	212,546.04	203,409.56
6.a. Barang	399,217.00	615,106.37	236,917.62	212,546.04	203,409.56
6.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	324,409.72	363,746.58	402,429.91	443,276.28	481,267.22
7.a. Barang	324,409.72	363,746.58	402,429.91	443,276.28	481,267.22
7.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a 8.b.)	(776,044.45)	(936,920.94)	(746,486.04)	(518,241.95)	(401,147.76)
8.a. Ekspor Antar Daerah	599,128.88	571,178.30	872,250.83	1,172,185.98	1,226,702.33
8.b. Impor Antar Daerah	1,375,173.33	1,508,099.24	1,618,736.87	1,690,427.93	1,627,850.09
PDRB	5,198,640.89	5,804,736.91	6,379,788.27	7,059,376.64	7,842,391.20

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan, 2012-2016 (juta rupiah)

Menurut Penggu Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,639,448.91	2,802,774.04	2,909,784.11	3,017,401.16	3,198,301.19
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	1,400,262.11	1,498,829.09	1,558,018.51	1,608,749.29	1,741,299.69
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	121,310.52	129,582.71	136,569.75	144,178.62	149,089.00
1.c. Pakaian	100,087.97	106,259.43	110,830.52	116,122.32	117,829.20
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan	100,007.57	100,237.43	110,030.32	110,122.32	117,027.20
Bakar Lainnya	196,372.27	204,828.70	207,712.05	217,319.66	225,923.28
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	37,390.70	40,284.30	41,866.09	45,202.69	47,282.75
1.f. Kesehatan	82,283.78	87,782.19	89,485.62	92,388.84	97,320.29
1.g. Transportasi /Angkutan	343,239.23	354,604.42	368,457.67	377,272.35	398,931.00
1.h. Komunikasi	43,113.47	46,109.68	47,647.76	48,900.78	50,673.26
1.i. Rekreasi dan Budaya	69,886.01	71,672.25	75,526.62	79,223.32	75,345.79
1.j. Pendidikan	30,958.94	31,336.17	32,372.83	34,348.40	35,290.32
1.k. Restoran dan Hotel	148,009.01	158,217.79	160,502.38	167,253.78	170,392.70
1.1. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	66,534.90	73,267.32	80,794.33	86,441.14	88,923.90
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18,781.93	18,817.58	19,458.08	20,351.72	20,431.00
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a. + 3.b.)	855,610.44	899,888.10	923,051.36	1,024,352.27	929,633.32
3.a. Konsumsi Kolektif	855,610.44	899,888.10	923,051.36	1,024,352.27	929,633.32
3.b. Konsumsi Individu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,595,647.53	1,612,953.69	1,750,021.02	1,825,311.46	1,861,729.22
4.a. Bangunan	1,254,120.37	1,277,587.23	1,394,231.19	1,449,542.34	1,484,202.73
4.b. Non-Bangunan	341,527.16	335,366.46	355,789.83	375,769.12	377,526.49
5. Perubahan Inventori	40,928.29	80,371.14	39,203.69	(190,025.26)	(42,661.92)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	419,013.54	596,599.01	181,616.87	182,960.35	183,247.74
6.a. Barang	419,013.54	596,599.01	181,616.87	182,960.35	183,247.74
6.b. Jasa	0.00	0.00	0.00 40928	0.00	0.00
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	291,139.74	277,388.63	286,689.01	323,276.28	303,140.01
7.a. Barang	291,139.74	277,388.63	286,689.01	323,276.28	303,140.01
7.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Net Ekspor Antar Daerah	(648,924.89)	(862,671.66)	(471,128.39)	(255,966.12)	(266,793.34)
(8.a 8.b.)					
8.a. Ekspor Antar Daerah	555,668.95	510,982.76	677,672.29	953,556.72	1,092,822.16
8.b. Impor Antar Daerah	1,204,593.84	1,373,654.42	1,148,800.68	1,209,522.84	1,359,615.50
PDRB	4,629,366.00	4,871,343.27	5,065,317.72	5,301,109.30	5,580,747.19

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures
** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.3.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)

Atas Dasar Harga Berlaku Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57.62	58.68	59.07	58.65	57.21
1.a. Makanan dan Minuman Non	31.77	31.82	31.82	31.71	31.41
Beralkohol					
Minuman Beralkohol dan Rokok C. Pakaian	2.49	2.66	2.59	2.68	2.59
1.c. Pakaian 1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan	2.19	2.02	2.03	1.98	1.85
Bakar Lainnya	4.30	4.47	4.48	4.47	4.36
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	0.82	0.87	0.88	0.90	0.86
1.f. Kesehatan	1.77	1.80	1.87	1.76	1.63
1.g. Transportasi	6.60	7.21	7.49	7.19	7.07
/Angkutan 1.h. Komunikasi	0.89	0.91	1.01		1.04
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.41	1.60	1.64	1.03 1.65	1.04
1.j. Pendidikan	0.68	0.68	0.70	0.70	0.68
1.k. Restoran dan Hotel	3.23	3.28	3.14	3.09	2.82
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.46	1.34	1.44	1.49	1.48
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.39	0.40	0.40	0.39	0.35
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah					
(3.a. + 3.b.)	17.31	17.58	18.14	19.61	16.21
3.a. Konsumsi Kolektif	17.31	17.58	18.14	19.61	16.21
3.b. Konsumsi Individu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. +	2= 24	2426	2= <0	a= ==	24.54
4.b.)	37.34	34.36	35.68	35.77	34.56
4.a. Bangunan	29.91	27.36	28.04	27.82	27.02
4.b. Non-Bangunan	7.43	7.00	7.64	7.94	7.54
5. Perubahan Inventori	0.83	0.78	1.01	(3.81)	0.33
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	7.68	10.60	3.71	3.01	2.59
6.a. Barang	7.68	10.60	3.71	3.01	2.59
6.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	6.24	6.27	6.31	6.28	6.14
7.a. Barang	6.24	6.27	6.31	6.28	6.14
7.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Net Ekspor Antar Daerah					
(8.a 8.b.)	(14.93)	(16.14)	(11.70)	(7.34)	(5.12)
8.a. Ekspor Antar Daerah	11.52	9.84	13.67	16.60	15.64
8.b. Impor Antar Daerah	26.45	25.98	25.37	23.95	20.76

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.4.
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57.02	57.54	57.45	56.92	57.31
 1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol 	30.25	30.77	30.76	30.35	31.20
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.62	2.66	2.70	2.72	2.67
1.c. Pakaian	2.16	2.18	2.19	2.19	2.11
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya	4.24	4.20	4.10	4.10	4.05
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan Pemeliharaan Rutin Rumah	0.81	0.83	0.83	0.85	0.85
1.f. Kesehatan	1.78	1.80	1.77	1.74	1.74
1.g. Transportasi	7.41	7.28	7.27	7.12	7.15
/Angkutan					
1.h. Komunikasi	0.93	0.95	0.94	0.92	0.91
1.i. Rekreasi dan Budaya	1.51	1.47	1.49	1.49	1.35
1.j. Pendidikan	0.67	0.64	0.64	0.65	0.63
1.k. Restoran dan Hotel	3.20	3.25	3.17	3.16	3.05
1.1. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	1.44	1.50	1.60	1.63	1.59
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.41	0.39	0.38	0.38	0.37
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.48	18.47	18.22	19.32	16.66
(3.a. + 3.b.) 3.a. Konsumsi Kolektif	18.48	18.47	18.22	19.32	16.66
3.b. Konsumsi Individu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. +					
4.1 embentukan Wiodai Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	34.47	33.11	34.55	34.43	33.36
4.a. Bangunan	27.09	26.23	27.53	27.34	26.60
4.b. Non-Bangunan	7.38	6.88	7.02	7.09	6.76
5. Perubahan Inventori	0.88	1.65	0.77	(3.58)	(0.76)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	9.05	12.25	3.59	3.45	3.28
6.a. Barang	9.05	12.25	3.59	3.45	3.28
6.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	6.29	5.69	5.66	6.10	5.43
7.a. Barang	6.29	5.69	5.66	6.10	5.43
7.b. Jasa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a 8.b.)	(14.02)	(17.71)	(9.30)	(4.83)	(4.78)
8.a. Ekspor Antar Daerah	12.00	10.49	13.38	17.99	19.58
8.b. Impor Antar Daerah	26.02	28.20	22.68	22.82	24.36
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)

Atas Dasar Harga Berlaki Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.11	13.72	10.64	9.87	8.36
1.a. Makanan dan Minuman Non	10.70	11.85	9.89	10.29	10.02
Beralkohol					
Minuman Beralkohol dan Rokok C. Pakaian	8.00	19.10	6.86	14.68	7.40
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan	9.50	3.23	10.35	8.00	3.83
Bakar Lainnya	16.00	16.05	10.18	10.31	8.37
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan	12.06	18.32	10.59	13.33	5.87
Pemeliharaan Rutin Rumah					
1.f. Kesehatan	13.48	13.74	13.83	4.34	3.02
1.g. Transportasi /Angkutan	(4.69)	21.98	14.09	6.19	9.29
1.h. Komunikasi	7.11	14.33	21.22	12.75	12.20
1.i. Rekreasi dan Budaya	4.76	25.96	12.68	11.74	(3.65)
1.j. Pendidikan	14.33	12.60	12.73	10.22	7.28
1.k. Restoran dan Hotel	14.41	13.50	5.06	9.11	1.12
1.1. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	14.35	2.79	18.10	14.50	10.25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.87	14.79	9.33	6.64	(0.83)
		2,	7100	0.01	(0.02)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.08	13.46	13.35	19.65	(8.15)
(3.a. + 3.b.)					, ,
3.a. Konsumsi Kolektif	0.08	13.46	13.35	19.65	(8.15)
3.b. Konsumsi Individu	-	-	-	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. +	18.18	2.76	14.12	10.93	7.35
4.b.)	10.10	2.70	14.12	10.93	1.33
4.a. Bangunan	19.32	2.15	12.63	9.80	7.90
4.b. Non-Bangunan	13.83	5.22	19.94	15.05	5.44
5. Perubahan Inventori	(74.75)	4.49	41.93	(518.52)	(109.52)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(22.35)	54.08	(61.48)	(10.29)	(4.30)
6.a. Barang	(22.35)	54.08	(61.48)	(10.29)	(4.30)
6.b. Jasa	· · · · · -	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	62.91	12.13	10.63	10.15	8.57
7. a. Barang	62.91	12.13	10.63	10.15	8.57
7.b. Jasa	-	-	-	-	-
0.14.75					
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a 8.b.)	(29.32)	20.73	(20.33)	(30.58)	(22.59)
8.a. Ekspor Antar Daerah	111.73	(4.67)	52.71	34.39	4.65
8.b. Impor Antar Daerah	(0.41)	9.67	7.34	4.43	(3.70)
PDRB	10.74	11.66	9.91	10.65	11.09
LUKU	10.77	11.00	7,71	10.05	11.07

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.6.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Penggunaan, 2012-2016 (persen)

Atas Dasar Harga Konstan 2					2016**
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1.a. Makanan dan Minuman Non	4.92	6.19	3.82	3.70	6.00
Beralkohol	4.20	7.04	3.95	3.26	8.24
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	5.49	6.82	5.39	5.57	3.41
1.c. Pakaian	2.62	6.17	4.30	4.77	1.47
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan					
Bakar Lainnya	8.53	4.31	1.41	4.63	3.96
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan	E 15	7.74	2.02	7.07	1.60
Pemeliharaan Rutin Rumah	5.45	7.74	3.93	7.97	4.60
1.f. Kesehatan	9.70	6.68	1.94	3.24	5.34
1.g. Transportasi	4.17	3.31	3.91	2.39	5.74
/Angkutan					
1.h. Komunikasi	0.20	6.95	3.34	2.63	3.62
1.i. Rekreasi dan Budaya	0.69	2.56	5.38	4.89	(4.89)
1.j. Pendidikan	5.92	1.22	3.31	6.10	2.74
1.k. Restoran dan Hotel	8.35	6.90	1.44	4.21	1.88
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	10.45	10.12	10.27	6.99	2.87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.80	0.19	3.40	4.59	0.39
2. I engetuar an Konsumsi Livi Ki	0.00	0.19	3.40	4.33	0.39
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah				40.0=	(0.5E)
(3.a. + 3.b.)	4.88	5.17	2.57	10.97	(9.25)
3.a. Konsumsi Kolektif	4.88	5.17	2.57	10.97	(9.25)
3.b. Konsumsi Individu	-	-	-	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. +	4.86	1.08	8.50	4.30	2.00
4.b.)	7.00	1.00	0.50	4.50	2.00
4.a. Bangunan	4.26	1.87	9.13	3.97	2.39
4.b. Non-Bangunan	7.14	(1.80)	6.09	5.62	0.47
5. Perubahan Inventori	(77.59)	96.37	(51.22)	(584.71)	(77.55)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(17.29)	42.38	(69.56)	0.74	0.16
6.a. Barang	(17.29)	42.38	(69.56)	0.74	0.16
6.b. Jasa	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	53.42	(4.72)	3.35	12.76	(6.23)
7.a. Barang	53.42	(4.72)	3.35	12.76	(6.23)
7.b. Jasa	-	·	_	-	
8. Net Ekspor Antar Daerah	(31.82)	32.94	(45.39)	(45.67)	4.23
(8.a 8.b.)					
8.a. Ekspor Antar Daerah	104.64	(8.04)	32.62	40.71	14.60
8.b. Impor Antar Daerah	(1.54)	14.03	(16.37)	5.29	12.41
PDRB	4.75	5.23	3.98	4.66	5.28

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.7.
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu
Menurut Penggunaan (2010 = 100), 2012-2016 (persen)

Menurut Pengguna					
Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	113.48	121.53	129.52	137.22	140.28
1.a. Makanan dan Minuman Non Beralkohol	117.94	123.24	130.28	139.16	141.45
1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	106.85	119.13	120.79	131.21	136.28
1.c. Pakaian	113.52	110.39	116.79	120.39	123.18
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan					
Bakar Lainnya	113.85	126.66	137.62	145.09	151.25
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan	114.20	125.62	122.69	140.22	142.02
Pemeliharaan Rutin Rumah	114.39	125.63	133.68	140.32	142.02
1.f. Kesehatan	111.90	119.31	133.22	134.64	131.68
1.g. Transportasi	100.00	118.07	129.64	134.46	138.97
/Angkutan					
1.h. Komunikasi	107.50 105.22	114.92	134.81	148.10 147.20	160.36
1.i. Rekreasi dan Budaya1.j. Pendidikan	113.94	129.23 126.74	138.18 138.31	147.20	149.13 150.02
1.k. Restoran dan Hotel	113.44	120.74	124.74	130.62	129.65
1.l. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	113.44	106.43	113.98	121.98	130.73
1.1. Darang Frioadi dan Jasa Ferorangan	114.01	100.43	113.70	121.70	130.73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	108.82	124.67	131.82	134.40	132.76
		12 1107	101102	20 10 10	1020.0
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	105.15	112.42	125.25	125 14	126 77
(3.a. + 3.b.)		113.43	125.35	135.14	136.77
3.a. Konsumsi Kolektif	105.15	113.43	125.35	135.14	136.77
3.b. Konsumsi Individu	-	-	-	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. +	121 (5	102 (7	120.07	120 22	145.00
4.b.)	121.65	123.67	130.07	138.33	145.60
4.a. Bangunan	123.99	124.32	128.30	135.50	142.80
4.b. Non-Bangunan	113.09	121.18	137.00	149.24	156.63
5. Perubahan Inventori	105.80	56.30	163.80	141.43	(59.98)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	95.28	103.10	130.45	116.17	111.00
6.a. Barang	95.28	103.10	130.45	116.17	111.00
6.b. Jasa	-	-	-	-	-
7 Junear Luca Negori (7 a + 7 h)	111 42	121 12	140.27	127 12	15076
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.) 7.a. Barang	111.43 111.43	131.13 131.13	140.37 140.37	137.12 137.12	158.76 158.76
7.b. Jasa	111.43	131.13	140.37	137.12	136.70
7.0. 3454	-	-	-	-	
8. Net Ekspor Antar Daerah	119.59	108.61	158.45	202.47	150.36
(8.a 8.b.)					
8.a. Ekspor Antar Daerah8.b. Impor Antar Daerah	107.82	111.78	128.71	122.93	112.25
	114.16	109.79	140.91	139.76	119.73
PDRB	112.30	119.16	125.95	133,17	140.53

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures

^{**} Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Lampiran 1.8. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kapuas Hulu Menurut Penggunaan, 2010-2014 (persen)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015*)	2016**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.99	7.09	6.57	5.95	2.23
1.a. Makanan dan Minuman Non	6.23	4.49	5.71	6.82	1.64
Beralkohol 1.b. Minuman Beralkohol dan Rokok	2.38	11.49	1.39	8.62	3.86
1.c. Pakajan	6.71	(2.76)	5.80	3.08	2.32
1.d. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan					
Bakar Lainnya	6.88	11.25	8.65	5.43	4.24
1.e. Perabot, Peralatan rumahtangga dan	6.27	9.82	6.41	4.97	1.21
Pemeliharaan Rutin Rumah	0.27	9.62		4.57	1.21
1.f. Kesehatan	3.45	6.62	11.66	1.06	(2.20)
1.g. Transportasi /Angkutan	(8.50)	18.07	9.80	3.71	3.36
1.h. Komunikasi	6.90	6.90	17.31	9.86	8.28
1.i. Rekreasi dan Budaya	4.04	22.82	6.93	6.52	1.31
1.j. Pendidikan	7.94	11.24	9.12	3.88	4.42
1.k. Restoran dan Hotel	5.59	6.18	3.56	4.71	(0.74)
1.1. Barang Pribadi dan Jasa Perorangan	3.53	(6.65)	7.10	7.02	7.17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.02	14.57	5.73	1.95	(1.22)
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah					
(3.a. + 3.b.)	(4.58)	7.88	10.51	7.81	1.21
3.a. Konsumsi Kolektif	(4.58)	7.88	10.51	7.81	1.21
3.b. Konsumsi Individu	-	=	-	-	-
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. +	12.70	1.65	5.18	6.35	5.25
4.b.)	12.70				3.23
4.a. Bangunan	14.44	0.27	3.21	5.61	5.38
4.b. Non-Bangunan	6.24	7.15	13.05	8.94	4.95
5. Perubahan Inventori	12.63	(46.79)	190.96	(13.66)	(142.41)
6. Ekspor Luar Negeri (6.a. + 6.b.)	(6.12)	8.21	26.52	(10.95)	(4.45)
6.a. Barang	(6.12)	8.21	26.52	(10.95)	(4.45)
6.b. Jasa	-	-	-	-	-
7. Impor Luar Negeri (7.a. + 7.b.)	6.19	17.68	7.05	(2.32)	15.78
7.a. Barang	6.19	17.68	7.05	(2.32)	15.78
7.b. Jasa	-	-	-	-	-
8. Net Ekspor Antar Daerah					
(8.a 8.b.)	3.68	(9.18)	45.89	27.78	(25.74)
8.a. Ekspor Antar Daerah	3.47	3.67	15.15	(4.49)	(8.69)
8.b. Impor Antar Daerah	1.14	(3.83)	28.35	(0.81)	(14.33)
PDRB	5.72	6.11	5.70	5.73	5.53

^{*} Angka Sementara/Preliminary Figures
** Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Hitle: INCOLUCE SHILLING SOLICE SHILLING SOLICE SHILLING SOLICE SHILLING SOLICE SHILLING SOLICE SOLICE SHILLING SOLICE SHILLIN

